

## **JALAN TERJAL MENARIK MODAL ASING**

**Carunia Mulya Firdausy**

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Tarumanagara

Presiden Joko Widodo pada Rabu, 28 April 2021 “menambah” satu Kementerian Investasi dalam Kabinet Indonesia Majunya. Pembentukan kementerian ini diperuntukkan agar pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebesar 4,5 persen sampai 5,5 persen pada tahun 2021 dapat tercapai. Bahkan hadirnya kementerian ini juga diharapkan dapat mendorong konsumsi, geliat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan perluasan lapangan kerja.

Untuk mencapai harapan tersebut, kebijakan, program dan koordinasi kementerian investasi khususnya dalam menarik arus penanaman modal asing (PMA) perlu perhatian. Pasalnya, PMA memiliki kontribusi penting dalam menambah pundi-pundi devisa yang diperlukan untuk mendukung ekspor, stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, anggaran pemerintah dan pembayaran utang luar negeri. Sayangnya, upaya menarik PMA masuk tersebut tidaklah mudah. Hal ini karena upaya menarik PMA memiliki berbagai tantangan. Oleh karena itu, Kementerian Investasi harus mampu menyikapi dan mencari jalan keluar mengatasi tantangan berikut ini.

### **Tantangan PMA**

Tantangan pertama terkait kemampuan pemerintah dalam mengatasi pandemi covid-19. Pandemi covid-19 suka atau tidak suka telah berkontribusi menurunkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus 2,07 persen. Kontraksi pertumbuhan tersebut disumbangkan oleh turunnya pertumbuhan PMA sebesar minus 5,1 persen selama Januari sampai September 2020 (BKPM, 2020). Investasi PMA yang mengalami penurunan antara lain di sektor energi, transportasi udara, dan pariwisata (hotel, restoran, dan resorts). Penerimaan dalam sektor industri ini menurun sebesar antara 40 persen sampai 200 persen. Hal ini sebagai akibat menurunnya arus masuk PMA pada tingkat global sebesar 30 sampai

40 persen (UNCTAD, 2020). Angka ini mengindikasikan upaya menarik PMA masuk ke Indonesia akan menjadi semakin berat dan kompetitif.

Tantangan kedua yakni terbatasnya modal investasi pemerintah. BKPM (2020) memperkirakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2021 dibutuhkan dana investasi sebesar 5.817,3 triliun rupiah sampai 5.912,1 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, sebesar 84,7 persen sampai 90,1 persen diharapkan dapat dipenuhi dari sumber sektor swasta, sementara sisanya sebesar 5,0 persen sampai 7,1 persen diharapkan dari sumber dana pemerintah dan sebesar 4,9 persen sampai 8,1 persen dari sumber BUMN. Ini berarti kerja keras, cepat dan cerdas Kementerian Investasi untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi 5,0 persen yang diamanatkan Presiden Jokowi dari sumber dana sector swasta sangat diperlukan.

Tantangan ketiga yakni terkait masih tingginya indeks restriksi masuknya PMA (*FDI Restrictiveness Index*). OECD (2019) mencatat indeks restriksi masuknya PMA Indonesia sebesar 0,32. Indeks ini hanya lebih baik dibandingkan dengan Filipina (0,37), namun lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand (0,27), Malaysia (0,25), Laos (0,19), Brunei Darussalam (0,15), Vietnam (0,13), Myanmar (0,11), Singapura (0,06) dan Kamboja (0,05). Indeks ini lagi-lagi dapat menjadi persoalan dalam upaya Kementerian Investasi menarik PMA masuk ke Indonesia.

Keempat yakni tantangan terkait tingginya ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Indonesia. ICOR Indonesia tahun 2020 menurut BKPM tercatat sebesar 6,8. ICOR tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam (3,7), Filipina (4,1), dan Malaysia (5,4). Ini artinya produktivitas modal atau efisiensi marjinal modal atau *the cost of investment* di Indonesia relative rendah di bandingkan dengan negara-negara di atas.

Tatangan kelima terkait dengan kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business-EODB*). *EODB score* Indonesia pada tahun 2020 berada di urutan 73 dari 190 negara.

EODB skor Indonesia ini jauh lebih buruk dibandingkan dengan Singapura (2), Malaysia (12), Thailand (21), Brunei Darussalam (66), and Vietnam (70). EODB ranking Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Filipina (95), Kambodia (144), Laos (154), and Myanmar (165). Dari 10 aspek skor EODB, Indonesia hanya memiliki skor kemudahan berbisnis yang relative baik yaitu dalam melakukan kontrak bisnis (*enforcing contracts*) dan registrasi property (Bank Dunia, 2020).

Selain lima tantangan di atas masih banyak lagi tantangan yang dihadapi Kementerian Investasi dalam menarik PMA. Tantangan dimaksud antara lain meliputi, kualitas SDM, peraturan daerah, inefisiensi birokrasi, korupsi, infrastruktur termasuk pasokan listrik, akses pasar dan insentif, serta digitalisasi.

Semua tantangan tersebut di atas tentu tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hadirnya Kementerian Investasi tidak akan mampu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun 2021. Pasalnya, berbagai kebijakan dan program untuk menyikapi tantangan tersebut telah dirumuskan baik antara lain berupa kebijakan menyangkut infrastruktur, pengembangan SDM, insentif fiskal dan non-fiskal, dan *Omni bus law* Cipta Kerja. Bahkan pemerintah telah pula memiliki *master plan Making Indonesia 4.0*. (MI 4.0) dengan sepuluh program pada 7 fokus sektor manufaktur yang telah diundangkan sejak tahun 2018.

### **Langkah Berikut**

Kebijakan dan program di atas tentu tidak secara otomatis dan sederhana dapat langsung meminimalisir tantangan masuknya PMA ke Indonesia. Langkah-langkah berikut ini perlu dilakukan. Pertama, Kementerian Investasi harus mengawal dan mempromosikannya secara intensif, terukur dan sistimatis kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Jangan sampai, misalnya, kebijakan dan program MI 4.0 hanya diketahui oleh

7,0 persen pelaku bisnis saja (Aswichayono dan Rafitrandi, 2020). Kedua, berbagai insentif pajak yang ditawarkan untuk menarik PMA perlu dikawal dan difokuskan pada sektor industri yang memiliki sumber dana penelitian dan pengembangan (R&D) yang terbatas.

Ketiga, kebijakan dan program pengembangan SDM melalui *job training* dan pendidikan serta latihan vokasi harus dikerjasamakan dengan negara-negara yang telah memiliki dominasi PMA selama ini dan juga dengan negara potensial memasukkan investasinya ke Indonesia. Keempat, membentuk ekosistem investasi yang kondusif untuk menarik masuknya PMA. Satuan tugas yang fokus pada langkah ini perlu dibentuk bersama dengan para pihak terkait. Kelima, ketersediaan data yang memadai dan akurat juga tidak boleh dilupakan untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam menarik PMA.. Akhirnya, keterlibatan UMKM dalam pengembangan PMA perlu terus diperhatikan. Hal ini, misalnya, dapat dilakukan dengan pembentukan kerjasama ekonomi konkrit antara PMA, dan usaha besar nasional dengan UMKM. Semoga.